



PAPER – **OPEN ACCESS**

Bencana Banjir dan Kebijakan Pembangunan Perumahan Di Kota Makassar

Author : Haslinda B. Anriani dkk.,
DOI : 10.32734/lwsa.v2i1.599
Electronic ISSN : 2654-7066
Print ISSN : 2654-7058

Volume 2 Issue 3 – 2019 TALENTA Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/).

Published under licence by TALENTA Publisher, Universitas Sumatera Utara



Bencana Banjir dan Kebijakan Pembangunan Perumahan Di Kota Makassar

Flood Disaster and Housing Development Policy in Makassar City

Haslinda B. Anriani^a, Ansar Arifin^b, Harifuddin Halim^c, Rasyidah Zainuddin^d, Abdul
Malik Iskandar^e.

^aUniversitas Tadulako, Jl. Sukarno Hatta, Palu, 90222, Indonesia

^bUniversitas Hasanuddin, Jl. Perintis Kemerdekaan, 90234, Makassar, Indonesia

^{c,d}STKIP Cokroaminoto, Jl. Teuku Umar No. 36, Pinrang, 92713, Indonesia

^eUniversitas Mega Rezky, Jl. Antang Raya, 90234, Makassar, Indonesia

Email: Haslinda.tadulako@gmail.com, ansararifin@gmail.com, Athena_lord73@yahoo.com, Georgiana.aan07@gmail.com,
abdul_malikiskandar@yahoo.com

Abstract

Flood is a natural phenomenon that always occurs every rainy season, especially in Makassar city. From year to year, the flood has increased in intensity and frequency. In addition, the area affected by floods is getting wider and more extensive and the duration of the inundation of water in an area also takes longer to recede. The main causes of the flood are environmental factors, human factors, and structural factors. Therefore, this paper is intended to reveal the factors of housing development resulting in floods in the city of Makassar. This research is descriptive qualitative with data collection techniques using literature study techniques and documentation studies. Data is analyzed qualitatively then concludes with conclusions. The results of the study show that mass housing development is a major factor in the occurrence of floods. Another reason is the lack of government control over the construction of housing related to environmental management.

Keywords: flood disaster; Policy; housing development; environmental governance;

Abstract

Banjir merupakan fenomena alam yang selalu terjadi setiap musim hujan khususnya di Kota Makassar. Dari tahun ke tahun, banjir tersebut mengalami peningkatan intensitas, dan frekuensi. Selain itu, wilayah terdampak banjir makin luas dan makin banyak serta durasi genangan air di suatu wilayah juga memakan waktu lebih lama untuk surut. Penyebab utama banjir tersebut adalah faktor lingkungan, faktor manusia, dan faktor birokrasi. Oleh karena itu, tulisan ini dimaksudkan untuk mengungkapkan faktor pembangunan perumahan mengakibatkan bencana banjir di Kota Makassar. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik kajian pustaka dan studi dokumentasi. Data dianalisis secara kualitatif kemudian diakhiri dengan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan perumahan secara massal merupakan faktor utama terjadinya banjir. penyebab lainnya adalah kurangnya kontrol pemerintah terhadap pembangunan perumahan tersebut terkait tata lingkungan.

Kata Kunci: bencana banjir, kebijakan, pembangunan perumahan, tata lingkungan;

1. Pendahuluan

Banjir sebagai *natural disaster* merupakan kejadian yang memiliki kemungkinan untuk terjadi setiap waktu. Kedatangannya datang begitu tiba-tiba sehingga manusia tidak dapat melakukan apapun untuk mengantisipasinya.

Dalam beberapa waktu rentang tahun 2017-2018, fenomena bencana banjir yang terkadang diiringi oleh bencana tanah longsor juga berdampak pada hilangnya materi dan korban manusia, tekanan psikis, dan sebagainya. Laporan seperti ini selalu terjadi setiap tahun dengan variasi bencana mulai dari gempa bumi, gunung meletus, tsunami, kebakaran hutan, serta fenomena terbaru yaitu likuifaksi, dan sebagainya. Pada saat yang sama potensi bencana tersebut dalam memunculkan korban juga besar. Terkait banjir, bencana ini yang paling mudah terjadi khususnya di dataran rendah. Penyebabnya sederhana adalah terjadinya hujan yang cukup deras dan berlangsung lama tanpa henti. Bila kondisi ini terjadi, maka dapat dipastikan terjadi pengungsian kelompok masyarakat tertentu ke tempat yang tidak terjangkau oleh banjir.

Di beberapa kota-kota besar Indonesia, banjir sudah merupakan langganan utamanya di musim hujan. Sebutlah kota Bandung, kota Semarang, kota Jakarta, kota Samarinda, kota Makassar, dan sebagainya. Bahkan, kota-kota tersebut sudah termasuk dalam kategori rawan dan siap siaga bagi warganya saat memasuki musim hujan. Bila ditelusuri lebih jauh realitas tersebut, bencana khususnya banjir memiliki masalah yang kompleks, terutama karena melibatkan hampir semua sektor kehidupan yang sifatnya sistemik, struktural, birokratik, dan sosial-budaya.

Di kota Makassar, banjir yang terjadi setiap musim hujan juga mengalami peningkatan dampak dan paparan. Ini menunjukkan peningkatan masalah yang makin kompleks. Padahal mestinya, masalah tersebut seharusnya mengalami perbaikan. Misalnya, durasi banjir berlangsung lebih lama dari musim ke musim, cakupan area banjir juga mengalami perluasan dari musim ke musim sehingga masyarakat terdampak juga mengalami masa tunggu normal. Kondisi ini memperkuat adanya dugaan persoalan pada level struktural berupa kebijakan yang melibatkan banyak dinas, seperti pemerintah kota melalui kebijakan RTRW, dinas kehutanan dan lingkungan hidup melalui kebijakan pengelolaan lingkungan, dan sebagainya.

Dalam paper ini ditelusuri konsep dan implementasi kebijakan dinas terkait dalam lingkup pemerintah kota Makassar tentang penanggulangan bencana banjir tersebut.

2. Kajian Tentang Kebijakan Sosial

Pembuatan kebijakan merupakan fungsi penting dari sebuah pemerintahan. Oleh karena itu, kemampuan dan pemahaman yang memadai dari pembuat kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan menjadi sangat penting bagi terwujudnya kebijakan yang cepat, tepat, dan memadai. Kemampuan dan pemahaman terhadap prosedur pembuatan kebijakan tersebut juga harus diimbangi dengan pemahaman dari pembuat kebijakan terhadap kewenangan yang dimiliki.

Hal itu berkaitan dengan kenyataan sebagaimana diungkapkan oleh Gersson bahwa kebijakan dibuat dan dilaksanakan pada semua tingkatan pemerintahan, karenanya tanggung jawab para pembuat kebijakan akan berbeda pada setiap tingkatan sesuai dengan kewenangannya. Selain itu, menurut Gersson hal yang penting lainnya adalah bagaimana memberikan pemahaman mengenai akuntabilitas dari semua pembuat kebijakan kepada masyarakat yang dilayaninya. Hal ini juga sejalan dengan uraian Gardono [1] bahwa sebuah kebijakan harus berimplikasi vertikal, horizontal, dan regional.

Berdasarkan pemahaman yang seperti di atas dapat dipastikan bahwa pembuatan kebijakan yang mempertimbangkan berbagai aspek dan dimensi yang terkait, sehingga pada akhirnya sebuah kebijakan dapat dipertanggungjawabkan secara memadai.

Mengingat peran penting dari kebijakan dan dampaknya terhadap masyarakat, maka para ahli juga menawarkan sejumlah teori yang dapat digunakan dalam proses perumusan kebijakan serta kriteria yang dapat digunakan untuk mempengaruhi pemilihan terhadap suatu kebijakan tertentu. Teori dan kriteria tersebut dapat ditentukan dalam buku Anderson [2] yang berjudul "*Public policy making: an introduction*". Menurutnya, terdapat tiga teori utama yang dapat digunakan dalam proses pembuatan kebijakan, yaitu:

- Teori *rasional-komprehensif*, adalah teori yang intinya mengarahkan agar pembuatan sebuah kebijakan dilakukan secara rasional-komprehensif dengan mempelajari permasalahan dan alternatif kebijakan secara memadai.
- Teori *incremental*, adalah teori yang intinya tidak melakukan perbandingan terhadap permasalahan dan alternatif serta lebih memberikan deskripsi mengenai cara yang dapat diambil dalam membuat kebijakan.
- Teori *mixed-scanning* adalah teori yang intinya menggabungkan antara teori rasional-komprehensif dengan teori *incremental*.

Selain itu, Anderson juga mengemukakan enam kriteria yang harus dipertimbangkan dalam memilih kebijakan, yaitu: nilai-nilai yang dianut baik oleh organisasi, profesi, individu, kebijakan maupun ideologi, afiliasi partai politik, kepentingan konstitusi, opini publik; penghormatan terhadap pihak lain, serta aturan kebijakan.

Teori lain yang digunakan dalam pembuatan kebijakan adalah:

- a. Teori Kelembagaan memandang kebijakan sebagai aktivitas kelembagaan dimana struktur dan lembaga pemerintah merupakan pusat kegiatan politik.
- b. Teori Kelompok yang memandang kebijakan sebagai keseimbangan kelompok yang tercapai dalam perjuangan kelompok pada suatu saat tertentu. Kebijakan pemerintah dapat juga dipandang sebagai nilai-nilai kelompok elit yang memerintah
- c. Teori Elit memandang Kebijakan pemerintah sebagai nilai-nilai kelompok elit yang memerintah.
- d. Teori Permainan memandang kebijakan sebagai pilihan yang rasional dalam situasi-situasi yang saling bersaing.

3. Metodologi

Penelitian dalam paper ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kajian literatur terhadap dokumen kebijakan RTRW Kota Makassar, dokumen pembangunan lingkungan, dan program pembangunan instansi terkait masalah penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi dokumentasi berupa data kebijakan dan program dari instansi terkait. Analisis data menggunakan teknik taksonomik yaitu mengklasifikasi dan mengkategorikan data sejenis kemudian menemukan persamaannya.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1. Karakteristik Banjir Kota Makassar

Nandini [3] mengklasifikasi banjir di Kota Makassar menurut tingkat kerawanan genangan dalam dua macam, yaitu: level rawan (luas 14.161,1 ha) yang terdapat di semua wilayah dan level sangat rawan (luas 3.275,9 ha) di Biringkanaya. Wilayah level rawan memiliki karakteristik fisik yaitu berbentuk dataran biasa, dataran berbentuk aluvial, berkarakteristik pantai dan rawa, serta berbentuk sabuk *meander*; jenis tanah berkarakteristik Entisol serta Inceptisol. Wilayah ini umumnya digunakan untuk pemukiman, pertanian di lahan yang kering, sawah, padang rumput, tubuh air, dan tambak. Adapun wilayah bercirikan wilayah dataran serta dataran berciri alluvial, jenis tanah berciri Ultisol dan berciri Inceptisol, serta pemanfaatan wilayah rawa, wilayah sawah, dan wilayah tambak.

Saat musim hujan berlangsung dengan ketebalan 100 mm, kemungkinan besar terjadi genangan dengan variasi ketinggian 15 hingga 150 cm tergantung pada durasi genangan antara 2 sampai 10 jam dan tergantung pada intensitas serta besaran air hujan yang turun. Kondisi ini merupakan juga akibat dari terjadinya perubahan penutupan lahan yang berkonsekuensi pada tidak meresapnya aliran air ke dalam tanah. Keadaan ini umumnya banyak terjadi di pusat kota yang merupakan wilayah terkonsentrasinya bangunan dengan kepadatan tinggi. Konsentrasi bangunan tersebut antara lain pemukiman, pertokoan, dan perkantoran, dengan rata-rata aliran permukaan 0-53 mm.

Posisi Kota Makassar yang berada pada ketinggian 0-6 mm dpl (dataran rendah) juga turut berpengaruh terhadap genangan air yang begitu mudah terjadi saat air laut mengalami pasang. Selain itu, posisi lereng dengan kemiringan yang kecil menyebabkan naiknya air pasang dengan cepat menggenangi sebagian wilayah Kota Makassar yang berakibat pada banjir di Kota Makassar.

4.2. Banjir dan Penyebabnya

Realitas banjir hari ini memperlihatkan hal yang berbeda dengan realitas banjir sebelumnya. Saat ini, banjir terlihat lebih mudah terjadi dan menimbulkan genangan. Hujan yang berlangsung 1 hingga 2 jam dengan intensitas yang tinggi dapat menimbulkan genangan. Tidak tanggung-tanggung, genangan tersebut terjadi di jalan raya yang merupakan jalanan provinsi. Bahkan, pada beberapa titik banjir, para pengendara tidak bisa melewati jalanan karena genangannya cukup tinggi sehingga banyak pengendara roda dua harus berhati-hati melewatinya.

Sejumlah titik banjir yang cukup parah di kota Makassar terjadi di jalan urip sumoharjo depan gubernuran, di jalan Pettarani, depan Universitas Islam Makassar, depan persimpangan Perumahan BTP Tamalanrea. Padahal, wilayah ini termasuk cukup tinggi lokasinya. Bahkan, ada banyak kawasan perumahan yang berlokasi di wilayah pinggiran yang tenggelam sehingga warga terpaksa mengungsi ke tempat yang tidak terjangkau banjir hingga beberapa hari lamanya.

Mengamati perkembangan kota Makassar hari ini, paling tidak dapat diprediksi faktor penyebab terjadinya banjir tersebut. Berdasarkan berbagai hasil penelitian, penyebab banjir tersebut adalah kondisi drainase yang tidak lagi memadai [4] disebabkan oleh sistem perencanaan drainase perkotaan yang buruk dan tidak terkoneksi satu sama lain komponennya [5], tidak cukupnya Ruang Terbuka Hijau akibat lemahnya RUTRW Kota Makassar [6], meningkatnya pembangunan kawasan pemukiman yang berakibat pada kurangnya wilayah resapan air [7], kurangnya komunikasi pemerintah dengan masyarakat dalam penanggulangan banjir [8], dan ketidaksinkronan program kerja pengendalian banjir dan implementasi SKPD [3].

Mencermati uraian sebab banjir di atas, dapat disimpulkan dua hal utama, yaitu: (1) sebab terkait kebijakan, dan (2) sebab terkait implementasi, dan (3) sebab terkait sosial-budaya.

Dimensi kebijakan merupakan hulu sebuah program kerja. Kebijakan merupakan acuan masyarakat dan dinas terkait untuk bertindak. Dalam konteks banjir, hal tersebut sangat erat terkait dengan kebijakan RTRW dan Tata Ruang, serta RTH. Dalam hal ini ada ketidaksinkronan para pemangku kebijakan berdasarkan wilayah kerja masing-masing dinas dalam mencocokkan objek program yang sama. Sementara dimensi implementasi kebijakan juga mengalami kendala akibat persoalan anggaran misalnya yang belum turun, serta tidak dilibatkannya stakeholder lain dalam mengambil keputusan program. Misalnya, kajian untuk membangun kawasan pemukiman kurang melibatkan Dinas Tata Ruang dan Kementerian Lingkungan Hidup.

Adapun sebab sosial-budaya terkait dengan rendahnya partisipasi masyarakat sebagai bentuk tanggungjawab bersama dalam menanggulangi bencana banjir. Hal tersebut disebabkan oleh persepsi masyarakat bahwa penanggulangan banjir merupakan tanggung jawab pemerintah melalui BPBD, dan pemerintah kota Makassar).

4.3. RTRW, Tata Lingkungan dan Tata Ruang: Kebijakan Yang Tidak Sinkron

Peraturan Perundangan Tata Ruang No. 26 / 2007, Pasal 1 ayat (9) sebagai landasan hukum tertinggi, tercantum uraian bahwa pemanfaatan ruang merupakan usaha membangun dasar legal bagi stakeholder (masyarakat, pemda, dan pemerintah) dalam mengatur tata ruangnya. Hal ini merupakan acuan legal formal bagi pemerintah dari level tertinggi sampai terendah dalam mengambil keputusan tentang pengelolaan serta penggunaan ruang yang dalam prosesnya merupakan tanggungjawab bersama secara integratif untuk mewujudkan capaian pembangunan.

Dokumen perbaikan RTRW Kota Makassar Tahun 2001, menjelaskan bahwa tata ruang kota Makassar diatur menjadi 9 (sembilan) bagian daerah kota dengan kategori fungsional, (1) fungsi utama, (2) fungsi penunjang. Hal tersebut dipertegas lagi dalam Perda No. 6 / 2006 tentang RTRW Kota Makassar 2005-2015 [9].

Perencanaan kawasan pengembangan terpadu Kota Makassar secara jelas terwujud dalam Perda No. 6 / 2006 dengan rincian: (1) Area Pusat Kota, yaitu Kecamatan Wajo, Bontoala, Ujung Pandang, Mariso, Makassar, Ujung Tanah dan Tamalate; (2) Area Permukiman Terpadu, yaitu Kecamatan Manggala, Panakukang, Rappocini dan Tamalate; (3) Area Pelabuhan Terpadu, yaitu Kecamatan Ujung Tanah dan Wajo; (4) Area Bandara Terpadu, yaitu Kecamatan Biringkanaya dan Tamalanrea; (5) Area Maritim Terpadu, yaitu Kecamatan Tamalanrea; (6) Area Industri Terpadu, yaitu Kecamatan Tamalanrea dan Biringkanaya; (7) Area Pergudangan Terpadu, yaitu Kecamatan Tamalanrea, Biringkanaya dan Tallo; (8) Area Pendidikan Tinggi Terpadu, yaitu Kecamatan Panakukang, Tamalanrea dan Tallo; (9) Area Penelitian Terpadu, yaitu Kecamatan Tallo; (10) Area Budaya Terpadu, yaitu Kecamatan Tamalate; (11) Area Olahraga Terpadu, yaitu Kecamatan Tamalate; (12) Area Bisnis dan Pariwisata Terpadu, yaitu Kecamatan Tamalate; (13) Area Bisnis Global Terpadu, yaitu Kecamatan Mariso [9].

Pelaksanaan RTRW Kota Makassar terindikasi tidak berjalan sesuai dengan peruntukannya. Bahkan, sejak 2005 sampai 2014 ada wilayah yang sama sekali mengalami pergeseran fungsi. Misalnya, pada tahap awal ruang yang diperuntukkan sebagai area edukasi, namun kemudian wilayah tersebut banyak bermunculan ruko yang mengindikasikan adanya arah bisnis dan perdagangan.. Situasi ini yang terjadi di wilayah Kecamatan Panakukang, Tamalanrea, dan Biringkanaya yang hari ini bergeser fungsinya menjadi area bisnis dan perdagangan, meski Perda Kota Makassar No 6 / 2006 menetapkannya sebagai area pendudukan [9].

Selanjutnya, terkait perkembangan perumahan dan pertokoan di Kota Makassar yang dari waktu ke waktu meningkat, cenderung diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk yang drastis. Kenaikan jumlah penduduk tersebut berkonsekuensi terhadap kebutuhan tempat tinggal. Hal ini dipertegas oleh Yunus [10] bahwa data Dinas Perumahan dan Permukiman merilis perbandingan jumlah rumah yang tersedia hingga 2018 sebanyak 243.685 unit dengan jumlah keluarga sekitar 350 ribu. Selisihnya 114 ribu merupakan jumlah kebutuhan unit rumah

Uraian tentang proyeksi penduduk dan kebutuhan perumahan sebagaimana data di atas menimbulkan konsekuensi atas RTRW, tata lingkungan, RTH, dan sebagainya. Kurang terkendalinya pembangunan pemukiman dan perumahan yang pesat lebih sering tidak sejalan dengan RTRW sehingga berdampak pada munculnya hunian liar dan alih fungsi lahan, seperti lahan resapan air dan pinggiran kanal atau sungai yang berubah menjadi hunian penduduk [11].

Temuan Hidayansyah (2007)[6] juga memperkuat konsekuensi tersebut bahwa ada pelanggaran implementasi RTRW yang tidak sinkron dengan RPJMD. Pembangunan Carrefour dan Mtoz sebagai pusat perbelanjaan di wilayah Tamalanrea merupakan contoh kasus, meskipun area ini diperuntukkan untuk pusat pendidikan, industri, dan kemiliteran, perindustrian, dan pendidikan. Pelanggaran ini secara tidak langsung melahirkan pelanggaran lainnya yang merusak RTRW, tata lahan, RTH, dan sebagainya seperti pembangunan perumahan, dan kawasan bisnis berupa pusat pertokoan dan perbelanjaan di sekitar pusat perbelanjaan tersebut. Inilah yang kemudian merusak lingkungan, dan mengurangi lahan resapan banjir.

4.4. Koordinasi SKPD dan Stakeholder Tidak Berjalan

Pemerintah Kota Makassar telah menuangkan strategi pengendalian dan penanggulangan banjir ke dalam lima strategi, yaitu pengaturan daerah rawan banjir, pengendalian tata ruang, pengaturan debit air, partisipasi warga masyarakat, dan pengaturan DTA. Sebagai kebijakan umum, Strategi tersebut diambil oleh dinas dalam Pemerintah Kota Makassar sebagai penanggungjawab berdasarkan tugas dan fungsi dinas tersebut.

Dalam konteks tersebut, program penanggulangan dan pengendalian banjir berada dalam wewenang dinas berikut: (1) Dinas Tata Ruang dan Bangunan, (2) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, (3) Bappeda, (4) Dinas Pekerjaan Umum, (5) Dinas Kelautan dan Ketahanan Pangan, (6) Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Keindahan, dan (7) Dinas Sosial. Tiap dinas tersebut terkait oleh program masing-masing yang mengacu pada visi misi Kota Makassar.

Adapun program-program pengendalian banjir kota Makassar terkait RTRW dan masing-masing dinas terlihat rinciannya pada Tabel 1.

Tabel 1. SKPD dan Program Terkait

No.	Program Terkait Pengendalian Banjir	Instansi/Dinas/SKPD				
		Bappeda	Tata Ruang & Bangunan	Kecamatan	Pekerjaan Umum	PLH & K
1	Perencanaan tata ruang	√	√			
2	Pemanfaatan ruang		√	√		
3	Pembangunan drainase/gorong-gorong			√	√	
4	Pembangunan turap talud dan bronjong				√	
5	Rehabilitasi/pemeliharaan turap talud dan bronjong				√	
6	Rehabilitasi pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong			√	√	
7	Pengembangan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya				√	
8	Pengendalian banjir				√	
9	Pembangunan kinerja pengelolaan persampahan			√	√	√
10	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup					√
11	Perlindungan dan konservasi sumberdaya alam					√
12	Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam					√
13	Peningkatan kualitas dan akses informasi					√

sumberdaya alam dan lingkungan hidup		
14	Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut	√
15	Pengelolaan ruang terbuka hijau	√
16	Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan	√
17	Pengembangan data dan informasi perencanaan	√
18	Perencanaan pengembangan kota	√
19	Perencanaan sosial dan budaya	√
20	Perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam	√
21	Perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	√
22	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan lahan	√
23	Pengelolaan areal tanah	√
24	Optimalisasi pemanfaatan teknologi dan informasi	√

Sumber: RPJMD Kota Makassar (Nandini, 2010)[3]

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa terkait pengendalian banjir, secara teknis lebih banyak melibatkan instansi PU, Bappeda, serta instansi Tata Ruang dan Bangunan. Adapun instansi PLH dan K serta tingkat Kecamatan bekerja pada aspek non-teknis.

Keputusan suatu dinas atau instansi terkait keterlibatan dalam penanganan banjir lebih merupakan kewenangan pimpinan di level atas, dan bukan diusulkan oleh dinas. Kondisi tersebut disebabkan adanya keterbatasan alokasi usulan anggaran oleh pemda maupun pusat. Faktor lain penanganan banjir belum diprioritaskan oleh instansi terkait adalah koordinasi dan pemahaman yang kurang terhadap tupoksi SKPD (Nandini, 2010)[3].

4.5. Integrasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Banjir

Kejadian banjir tidaklah berdiri sendiri, melainkan disebabkan oleh beragam aspek mulai dari infrastruktur (teknis) maupun aspek lingkungan, aspek budaya, aspek ekonomi, dan sosial kelembagaan. Berdasar hal inilah sehingga penanganan banjir merupakan tanggungjawab semua pihak.

Penanganan banjir di Kota Makassar memerlukan sinkronisasi dan koordinasi antarinstansi terkait. Sebagai langkah awal, kesamaan persepsi terhadap tupoksi masing-masing instansi sangat dibutuhkan dalam merancang berbagai kegiatan penanganan banjir di tingkat SKPD. Kapasitas sumberdaya terkait pemahaman tupoksinya harus menjadi program dasar di masing-masing SKPD.

Koordinasi dan sinkronisasi SKPD terkait penanganan banjir merupakan hal urgen untuk dipetakan dalam bentuk tupoksi. Ini dimaksudkan agar program tidak tumpang-tindih, dan tidak saling klaim kegiatan. Oleh karena itu, untuk menjembatani hal tersebut, perlu dipertimbangkan untuk membuat unit kerja atau satuan pelaksana khusus yang mewakili semua instansi terkait dalam rangka penanganan banjir.

Pada aspek lain, pergeseran alih fungsi lahan yang tidak sesuai peruntukannya yang semakin marak menyebabkan perlunya pencegahan melalui penerbitan RUTRW yang baru dan adaptable. Kandungan RUTRW yang baru tersebut sebaiknya memuat dengan tegas dan jelas batas-batas pemanfaatan lahan, partisipasi warga masyarakat terkait tata ruang, tata ruang hijau, pencemaran udara yang ramah lingkungan, proteks area resapan air, penanganan daerah aliran sungai, kanal, dan sistem drainase kota, dan sebagainya [3].

5. Kesimpulan

Penanganan banjir di Kota Makassar harus bersifat multidimensional yang melibatkan banyak pihak. Hal ini merupakan keniscayaan karena penyebab banjir sangat beragam, antara lain, adanya alih fungsi lahan, kurangnya kawasan terbuka hijau, kurangnya area resapan, meningkatnya jumlah penduduk, masalah lingkungan, dan sebagainya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan kolaborasi antar instansi terkait mulai dari level kebijakan hingga implementasi program bersama terkait tugas dan fungsi instansi masing-masing. Meskipun realitas lapangan

memperlihatkan adanya ketidaksinkronan kerjasama yang disebabkan oleh faktor eksternal, namun semangat instansi untuk menciptakan kenyamanan hidup bagi masyarakat di Kota Makassar tetap dilaksanakan. Hal ini menjadi penting mengingat persoalan banjir makin meningkat dan makin mengancam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, ego-sektoral menjadi tidak laku dalam kolaborasi tersebut.

Ucapan Terima Kasih

Penghargaan yang tak terhingga kepada mereka yang berkontribusi dalam pembuatan paper ini, terkhusus Ansar Arifin, Harifuddin Halim, Rasyidah Zainuddin, dan Abdul Malik Iskandar. Karena merekalah, paper ini dapat dipublikasikan.

Referensi

- [1] Gardono, Iwan. 2011. Social Exclusion and Inclusion Policy in Indonesia. *International Journal of Business and Social Sciences*. Volume 2 No. 23 December 2011.
- [2] Andersson, James E. 2006. *Public Policy Making: An Introduction*. New York: Holt, Rinehartnd Winston
- [3] Nandini, Ryke. 2010. Kajian Implementasi Strategi Pengendalian Banjir Di Sub DAS Jeneberang Hilir (Studi Kasus Pengendalian Banjir di Kota Makassar). *Makalah* pada Prosiding “EKSPPOSE” Hasil-Hasil Penelitian Balai Penelitian Kehutanan Makassar. Makassar, 22 Juni 2010.
- [4] Rachmat, Adhe Reza, dan Adjie Pamungkas. 2014. Faktor-Faktor Kerentanan yang Berpengaruh Terhadap Bencana Banjir di Kecamatan Manggala Kota Makassar. Terbit Dalam *JURNAL TEKNIK POMMITS*, Volume 3(2): 178-184.
- [5] Arisandhy, Dana Rezky, Westi Susi Aysa, Ihsan. 2013. Prediksi Genangan Banjir Menggunakan Metode Rasional USSCS 1973: Studi Kasus Perumahan BTN Hamzy, BTN Antara, BTN Asal Mula, Kelurahan Tamalanrea Indah Kota Makassar. *Prosiding Temu Ilmiah IPLBI 2013*.
- [6] Hidayansyah, Rachmat. 2007. *Ruang terbuka hijau (RTH) Kota Makassar*. Perpustakaan Universitas Indonesia UI – Tesis. <http://lib.ui.ac.id/opac/ui/detail.jsp?id=109845&lokasi=lokal./diakses>, 10 Maret 2019.
- [7] Jusman. 2013. *Pengendalian Tata Ruang Kota Makassar Sebagai Upaya Pengurangan Resiko Bencana*. <http://jumsanskel.blogspot.com/2013/10/pengendalian-tata-ruang-kota-makassar.html/diakses>, tanggal 19 Maret 2019.
- [8] Rahman, Andi Ardillah, Ridwan M. Thaha, Suriah. 2016. Implementasi Strategi Program Gbsd Terhadap Perilaku Masyarakat dalam Penanggulangan Banjir Di Wilayah Kota Makassar. <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/19863/diakses> pada tanggal 21 Maret 2019.
- [9] Akbar, Kurniawan, A. Samsu Alam, dan A.M. Rusli. 2012. Implementasi Kebijakan Tata Ruang tentang Kawasan Pendidikan Tinggi Terpadu di Kota Makassar. Terbit dalam *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan* Volume 5, Nomor 1, Januari 2012: 37-46.
- [10] Yunus, Muhammad. 2019. “Warga Makassar Butuh 114 Ribu Rumah Baru”. <https://makassar.terkini.id/warga-makassar-butuh-114-ribu-rumah-baru/diakses> 19 Maret 2019.
- [11] Sampebulu, Victor, Lous Santoso, Yusni Mustari, Suriana La Tanrang. 2012. Tinjauan Tata Bangunan Perumahan dan Permukiman dengan Konsep Green River pada Daerah Aliran Sungai Pampang Kota Makassar. <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/6413/diakses>, 10 Maret 2019.